

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dunia saat ini sudah bergerak sangat maju. Setiap bangsa kini berlomba-lomba menyiapkan dunia yang lebih baik bagi masa depan warganya dan juga bagi kepentingan bersama umat manusia. bumi ini, hanya satu sementara perilaku yang tidak menghargai tempat tinggal bersama adalah pelanggaran moralitas yang berpegang kepada norma-norma hak asasi manusia sebagai pedomannya, lebih khusus lagi kepada pengakuan dan penerapan hak anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia.

Salah satu momen penting yang menguatkan komitmen bersama untuk mewujudkan sebuah dunia yang layak bagi anak sebagai wujud terpenuhinya hak anak adalah Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Mei Tahun 2002 yang mengadopsi laporan Ad Hoc pada sesi khusus untuk anak. Dokumen itu lah kemudian di kenal dengan “*A World Fit For Children*” Judul dokumen tersebut menunjukkan gaung punjak dari rangkaian upaya dunia untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masalah masa depan bumi. Kelangsungan kehidupan umat manusia dan lebih khusus lagi upaya untuk menyiapkan generasi masa depan yang lebih baik melalui anak-anak yang hidup pada masa sekarang ini dan masa selanjutnya.

Pembangunan KLA diawali dengan penelitian mengenai “*Children’s Perception of the Environment*” oleh Kevin Lynch (arsitek dari Massachusetts Institute of Technology) di 4 kota – Melbourne, Warsawa, Salta, dan Mexico City – tahun 1971-1975. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kota yang terbaik untuk anak adalah yang mempunyai masyarakat yang kuat secara fisik dan sosial; masyarakat yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas; yang memberi kesempatan pada anak; dan fasilitas pendidikan yang memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan dan dunia mereka. Penelitian tersebut dilakukan dalam rangka program Growing Up In Cities (GUIC) – tumbuh kembang di perkotaan yang disponsori oleh UNESCO. Mengingat keterlibatan Indonesia yang sudah sangat awal dan begitu intens tentang pemenuhan hak anak melalui Konvensi Hak Anak dan mengingat dunia layak anak merupakan komitmen global, maka pemerintah Indonesia segera memberikan tanggapan positif terhadap rekomendasi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tahun 2002 tersebut.<sup>1</sup>

Keikutsertaan Indonesia sebagai mana terumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang dasar 1945 yang menyebutkan bahwa :

“Tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”

Bab X A Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi “Setiap

---

<sup>1</sup>Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( No 11 Tahun 2011, *Kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak*), Hal 12

anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>2</sup>

Kebijakan KLA sangat diperlukan mengingat kondisi obyektif anak-anak Indonesia baik secara historis, filosofis, sosiologis maupun antropologis berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Kekhawatiran tersebut semakin kuat dengan melihat fakta global yang berubah sangat cepat baik karena perkembangan teknologi informasi, adanya agenda-agenda politik global maupun karena munculnya fenomena kehidupan baru seperti krisis pangan, krisis energi serta pemanasan global, perubahan iklim yang membawa anak-anak pada posisi yang semakin rentan. Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu adanya kebijakan KLA sebagai langkah awal dalam rangka menciptakan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan anak. Indonesia bergerak cepat dan memulai pondasi untuk mengembangkan KLA sejak tahun 2006.

Penetapan Kabupaten adalah adaptasi yang juga dilakukan Indonesia mengingat bahwa pembagian wilayah administratif di Indonesia terbagi dalam dua jenis satuan berupa Kabupaten dan kota, sementara tantangan yang dihadapi anak bukan hanya ada di kota namun juga dapat di temukan di Kabupaten. Untuk itu, maka perhatian pun diberikan kepada Kabupaten yang memiliki tantangan tersendiri yang tidak kalah kopleksnya dengan yang dihadapi oleh kota.

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Dasar 1945 tentang *Hak Asasi Manusia*, Pasal 2B ayat 2

Menindak lanjuti kebijakan nasional tersebut, masing-masing Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang dimaksudkan untuk melindungi Hak-hak Anak yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan kondisi otonomi daerahnya. Kabupaten Sleman mulai tahun 2011 telah ditetapkan sebagai wilayah pengembangan KLA

Kabupaten Sleman merupakan salah satu Kabupaten yang mendapatkan penghargaan KLA kriteria khusus Kluster ke 4 yaitu Inovasi Pendidikan Pemanfaatan waktu luang dan seni budaya pada tahun 2011 yang lalu, dan tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Sleman kembali dianugerahi Penghargaan KLA kategori Pratama. Untuk menyabet predikat sebagai KLA bukanlah perkara mudah. Pasalnya, kota/kabupaten harus memenuhi 31 indikator yang diambil dari 5 (lima) kluster utama pemenuhan hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas capaian yang sudah dilakukan. Namun yang terpenting dari ini semua adalah komitmen semua pihak untuk mewujudkan sebuah wilayah yang memungkinkan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, terbebas dari segala bentuk kekerasan, penelantaran dan eksploitasi serta suara dan pandangan anak dihargai sebagai bagian penting dalam masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>[www.Penkab Sleman .go.id](http://www.Penkab Sleman .go.id), 10 November 2012.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman BKBPMPP Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman melakukan Strategi sehingga pada Tahun 2011-2012 Kabupaten Sleman mendapatkan penghargaan sebagai KLA.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang sebelumnya, rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

***Bagaimana Strategi BKBPMPP Dalam mewujudkan Kabupaten Sleman sebagai KLA Tahun 2011-2012?***

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### a. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi yang dilakukan oleh BKBPMPP dalam mewujudkan Kabupaten Sleman sebagai KLA.

### b. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah, bahwa hal terpenting dari keseluruhan Proses Akademis adalah bagaimana manfaat tersebut nanti dapat dijadikan modal utama guna pembelajaran yang berkelanjutan. Oleh karena itu manfaat dari penelitian ini adalah untuk dapat memahami dan mendalami kebijakan tentang KLA. Dan memberikan

masuk ke Pemerintah Kabupaten Sleman Khususnya di BKBPMPP dalam meningkatkan pengembangan terhadap lingkungan anak.

#### D. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori merupakan bagian yang menjelaskan variabel-variabel dan hubungan antara variabel berdasarkan konsep dan definisi tertentu. Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi :

“Teori adalah serangkaian asumsi, konsep definisi proposisi untuk menerangkan suatu fenomena secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep”<sup>4</sup>

Sedangkan menurut Snelbecker :

“ Teori adalah seperangkat yang berinteraksi secara sintasik yaitu mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis dengan lainnya dengan data-data dasar yang diamati”<sup>5</sup>

Dengan demikian teori pada dasarnya merupakan sarana pokok yang sistematis yang dapat dihubungkan secara logis antara konsep dengan data-data dasar yang diamati antara fenomena sosial maupun alami yang hendak diteliti.

#### 1. Manajemen Strategis

Menurut James A.F. Stoner Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada

---

<sup>4</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*. Jakarta, hal 23

<sup>5</sup> Meleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005 hal 57.

organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>6</sup>

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani “*Strategos*” Stratos yang artinya militer dan “*ag*” yang artinya memimpin yang artinya generalship atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang.<sup>7</sup> Menurut Karl von Clausewits, Strategi merupakan suatu seni menggunakan pertempuran untuk memenangkan suatu perang. Sedangkan menurut C. Carto dan Paul R. Peter, mendefinisikan manajemen strategis sebagai suatu proses intraktif dalam mencapai keseluruhan tujuan organisasi secara tepat menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Ada beberapa tahapan yakni<sup>8</sup>

- a. Menganalisa kinerja lingkungan internal dan eksternal
- b. Membina pimpinan organisasi (misi dan obyektivitas)
- c. Merumuskan strategi Organisasi
- d. Menetapkan strategi Pengawasan

Sedangkan pengertian Manajemen Strategis merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi, untuk mencapai suatu tujuan.

---

<sup>6</sup> Agustinus Sri Wahyudi, *Manajemen Strategik*, (Jakarta: Binarupa Aksara: CV. Pustaka Setia) hal 28-36

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Ibid

## 2. Tahap- tahap Manajemen Strategis

### 1) Analisis Lingkungan Strategis

#### a. Lingkungan Internal

Merupakan salah satu dimensi yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan strategis, dimensi ini menyangkut kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weakness) yang pada umumnya dimiliki dalam pengembangan wilayah, bagian dari suatu analisis yang telah dikenal secara dunia akademik dengan istilah SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats).

Faktor Kekuatan (Strength) dalam hal Kelemahan (Weakness) terdapat dalam suatu Kegiatan organisasi. Hal ini, merupakan instrument yang ampuh dalam melakukan analisis perencanaan strategis, untuk memaksimalkan peranan faktor-faktor tersebut sekaligus berperan sebagai alat untuk memanipulasi kelemahan dan menekan dampak ancaman yang timbul, jika para penentu strategi kebijakan mampu menghadapi dua faktor tersebut dengan tepat, maka upaya memilih dan menentukan strategi yang efektif membuahkan hasil yang diharapkan.

#### b. Lingkungan Eksternal

Dalam lingkungan eksternal dikenal adanya faktor-faktor peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats), yakni faktor-faktor yang berasal dari luar, yang bisa menguntungkan dan mengancam serta dapat



dipengaruhi dinamika pembangunan, berupa lingkungan, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat sekitar.

Suatu lingkungan eksternal diperlukan untuk menekan agar berhasil meraih keberhasilan yang diharapkan dimasa depan, sehingga dapat diperhatikan dengan matang tujuan utama lingkungan eksternal adalah untuk mengetahui lingkungan dari luar agar dapat secara jelas peluang dan ancaman mengetahui faktor kunci keberhasilan.<sup>9</sup>

## 2. Kebijakan Publik

Secara etimologis kebijakan berasal dari kata *policy*. Istilah *policy* (Kebijakan) sering kali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan, program, keputusan undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar.

Menurut Carl Frederick, kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. Sedangkan merumuskan sebagai langkah yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> J. David Hunger & Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategis*, Andi copyright, 2001,2003. Hal 9-12

<sup>10</sup> Solihin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implemtasi Kebijakan Negara*, Bumi aksara, jakarta, 1997 hal 3.

Sedangkan menurut James Anderson mendefinisikan kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan. Artinya, yang dimaksud dengan kebijakan publik ialah tindakan (politik) apa pun yang diambil oleh pemerintah (pada semua level) dalam menyikapi sesuatu permasalahan yang terjadi dalam konteks atau lingkungan sistem politiknya. Dipahami seperti ini, maka perilaku kebijakan (policy behavior) akan mencakup pula kegagalan bertindak yang tidak disengaja, dan keputusan yang disengaja untuk tidak berbuat sesuatu apa pun, semisal tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan baik secara sadar atau tidak, untuk menciptakan rintangan-rintangan tertentu agar publik atau masyarakat tidak dapat menyikapi secara kritis terhadap kebijakan pemerintah.<sup>11</sup>

Sedangkan dalam studi kebijakan publik terdapat dua pendekatan, yakni: pertama dikenal istilah analisis kebijakan (policy analysis), kedua kebijakan publik politik (political public policy). Pada pendekatan pertama lebih fokus terhadap studi pembuatan keputusan (decision making) dan penetapan kebijakan (policy formation) dengan menggunakan model-model

---

<sup>11</sup>Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, CV Alvabeta, 2008, hal 7

statistik dan matematika yang canggih. Sedangkan pada pendekatan kedua, lebih menekankan pada hasil dan outcome dari kebijakan dari pada penggunaan metode statistik, dengan melihat interaksi politik sebagai faktor penentu, dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan lingkungan.<sup>12</sup>

1) Ciri-ciri Kebijakan Publik yaitu:

a. Tindakan Pemerintah

Sebuah proses politik yang melibatkan berbagai kepentingan dan sumber daya sehingga akhir dari proses politik tersebut adalah produk subyektif yang diciptakan oleh pilihan-pilihan sadar dari pelaku kebijakan.

b. Berorientasi pada kebijakan publik

Adapun orientasi yang dimaksudkan kembalinya peran dasar pemerintah sebagai *public service*, jadi baik penerimaan dan pengeluaran hanya berorientasi pada pelayanan publik.

2) Mengikat Masyarakat

Implikasi dikeluarkannya daerah adalah adanya suatu bentuk pilihan tindakan dari pemimpin daerah yang akan dialokasikan kepada seluruh masyarakat sehingga bersifat mengikat, serta idealnya diorientasikan terhadap terpenuhnya aspirasi dan kepentingan masyarakat.

3) Upaya untuk mencapai tujuan

Memahami apa yang telah terjadi sesudah suatu program berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni

---

<sup>12</sup>AG Subarsono. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka pelajar. Hal 5.

kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan urutan waktu tertentu.<sup>13</sup>

#### 4. KLA

##### a. Pengertian KLA

KLA adalah Kabupaten atau kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

##### b. Tujuan KLA

KLA bertujuan untuk membangun inisiatif Pemerintahan Kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di Kabupaten/kota.<sup>14</sup>

##### c. Indikator KLA

Indikator KLA dibuat dalam rangka untuk mengukur Kabupaten/kota menjadi Layak anak. Menteri Pemberdayaan perempuan dan perlindungan

---

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup>Peraturan Menteri Negara Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( No 11 Tahun 2011,*Kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak*), Hal 4-5

Anak bersama seluruh pemangku kepentingan ditingkat Nasional dan daerah, menetapkan 31 (tiga puluh satu) Indikator Pemenuhan Hak Anak yang sekaligus merupakan Indikator KLA.

Suatu Kabupaten/Kota dapat disebut Layak Anak apabila memenuhi 31 (tiga puluh satu) Indikator KLA dikembangkan mengacu pada Konvensi Hak Anak dan peraturan undang-undang terkait Anak. Karena prinsip kebijakan KLA adalah mendorong Kabupaten/kota agar menghormati hak anak. Berdasarkan Konvensi Hak Anak, Hak Anak dikelompokkan ke dalam 5 (lima) KLAster yakni:

1) Hak sipil dan kebebasan, yang meliputi:

- a. Hak atas identitas
- b. Hak perlindungan identitas
- c. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat
- d. Hak berfikir,berhati nurani, dan beragama
- e. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai
- f.Hak atas perlindungan Kehidupan pribadi
- g. Hak akses informasi yang layak
- h. Hak bebas penyiksaan dan pengukuman lain yang kejam

2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, yang meliputi:

- a. Bimbingan dan tanggung jawab orang tua
- b. Anak yang terpisah dari orang tua
- c. Reunifikasi
- d. Pemindahan anak secara ilegal

- e. Dukungan kesejahteraan bagi anak
  - f. Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga
  - g. Pengangkatan/ adopsi anak
  - h. Tinjauan penempatan secara berkala
  - i. Kekeraan dan penelantaran
- 3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan, yang meliputi :
- a. Anak penyandang disabilitas
  - b. Kesehatan dan layanan kesehatan
  - c. Jaminan sosial layanan dan fasilitas kesehatan
  - d. Standar hidup
- 4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, yang meliputi:
- a. Pendidikan
  - b. Tujuan pendidikan
  - c. Kegiatan liburan dan kegiatan seni dan budaya
- 5) Perlindungan khusus, yang meliputi:
- a. Anak dalam situasi darurat
  - b. Anak yang berhadapan dengan hukum
  - c. Anak dalam situasi eksploitasi
  - d. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( No 11 Tahun 2011, *Kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak*), Hal 16-21

Berdasarkan beberapa hak anak dalam kerangka konvensi hak anak indikator pengembangan KLA diantaranya adalah :

- 1) Penguatan Kelembagaan, adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk memenuhi hak anak
- 2) Persentase Anggaran untuk memenuhi hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan.
- 3) Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan program dan kegiatan mendapatkan masukan dari Forum Anak dari kelompok anak lainnya.
- 4) Tersedianya SDM terlatih KHA dan mampu menerapkan Hak Anak kedalam kebijakan, program dan kegiatan.
- 5) Tersedia data anak terpilih menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan.
- 6) Keterlibatan Lembaga masyarakat dalam pemenuhan Hak anak
- 7) Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak
- 8) Persentase anak yang terintegrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran.
- 9) Tersedia Fasilitas Informasi Layak Anak
- 10) Jumlah kelompok anak, termasuk forum anak yang ada dikabupaten/kota , kecamatan dan desa/kelurahan
- 11) Persentase Usia Perkawinan pertama dibawah 18 Tahun.
- 12) Tersedia lembaga Konsultasi bagi orang tua / keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak.

- 13) Tersedia LKSA
- 14) Angka Kematian Bayi
- 15) Prevalensi Kekurangan Gizi pada Balita
- 16) Persentase ASI eksklusif
- 17) Jumlah pojok ASI
- 18) Persentase Imunisasi Dasar lengkap.
- 19) Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental
- 20) Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan.
- 21) Persentase rumah tangga dengan akses air bersih
- 22) Tersedia kawasan tanpa rokok.
- 23) Angka partisipasi pendidikan anak usia dini
- 24) Persentase wajib belajar pendidikan 12 tahun.
- 25) Persentase Sekolah ramah anak
- 26) Jumlah sekolah yang memiliki program sarana dan prasarana perjalanan anak dari sekolah
- 27) Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif yang ramah anak, di luar sekolah yang dapat diakses semua anak.
- 28) Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan



- 29) Persentase Kasus Anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice)
- 30) Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan Anak.
- 31) Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.<sup>16</sup>

#### E. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan suatu pengertian dari segala yang menjadi hal pokok perhatian. Definisi konseptual dimaksudkan sebagai gambaran yang jelas, menghindari kesalah pahaman terhadap pengertian istilah yang ada dalam pokok permasalahan. Adapun definisi Konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Manajemen Strategis merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi, untuk mencapai suatu tujuan.
- 2) Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh

---

<sup>16</sup> Ibid

seseorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

- 3) KLA adalah Kabupaten atau kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

#### F. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu konsep dapat diukur dengan menggunakan indikator kongkrit. Dengan kata lain, definisi operasional merupakan outlet umum dari tulisan secara keseluruhan yang akan menjadi dasar dalam upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dan pengumpulan data. Adapun indikator-indikator yang digunakan adalah:

1. Strategi BKBPMPP dalam Mewujudkan KLA:
  - a. Sosialisasi KLA
  - b. Penanganan Permasalahan Anak
  - c. Melakukan Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan
  - d. Pengutan Konsolidasi Gugus Tugas KLA

2. Indikator KLA yaitu:
  - a. Hak sipil dan kebebasan
  - b. Lindungan keluarga dan pengasuhan
  - c. Kesehatan dan kesejahteraan
  - d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
  - e. Perlindungan Khusus

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk melaksanakan penelitian taraf pengetahuan ilmiah yang menyimpulkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip untuk mencapai kepastian mengenai suatu masalah.

### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif dapat didefinisikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Adapun ciri-ciri pendekatan kualitatif sebagai berikut:

- a. Dilakukan dengan latar belakang yang dialami, karena alat pentingnya adalah sumber data yang langsung.
- b. Bersikap deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa data-data gambar.

- c. Lebih memperhatikan proses dari pada hasil atau produk semata.
- d. Dalam menganalisa data cenderung induktif
- e. Lebih mementingkan makna<sup>17</sup>

## 2. Unit Analisa

Unit Analisa ini berisi penegasan tentang unit atau kesatuan yang menjadi subjek penelitian. Sesuai dengan permasalahan yang ada pada pembahasan masalah dalam penelitian ini, maka penulis akan melakukan kegiatan yaitu menyusun unit analisisnya pada pihak-pihak yang terkait dengan relevan dengan pembahasan dan secara tepat untuk dijadikan sumber dalam penyusunan karya tulis ini. Adapun Unit Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Dinas BKBPMPP
- b. Kepala Bidang Perlindungan Anak

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Yogyakarta, khususnya di BKBPMPP.

## 4. Jenis Data

Jenis data berisi tentang penjelasan mengenai tentang jenis data yang diperlukan dalam penelitian. Data merupakan informasi mengenai keberadaan konsep penelitian yang kita peroleh dari unit analisa yang dapat dijadikan sebagai sarana verifikasi empiris dalam kegiatan penelitian. Menurut cara

---

<sup>17</sup>Lexy Moleong. "Metodelogi kualitatif", bandung : PT Remaja Rosda Karya,1993, hlm 103

pengumpulannya, secara garis besar data penelitian dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- 1) Data Primer adalah semua informasi mengenai konsep penelitian yang kita peroleh secara langsung dari unit analisa yang dijadikan sebagai objek penelitian, yang dalam hal ini data primer di peroleh melalui wawancara langsung dengan pihak Badan keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak, mengenai data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- 2) Data Sekunder adalah semua informasi yang kita peroleh tidak secara langsung, melalui dokumen-dokumen yang mencatat keadaan konsep penelitian di dalam unit analisa dijadikan sebagai objek penelitian, media massa ataupun elektronik, data dokumen, dan dokumen-dokumen yang lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang di perlukan. Untuk memperoleh data yang representatif baik data primer maupun data skunder, maka dalam penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang meliputi:

### 1. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang di lakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai konsep penelitian

terhadap individu manusia yang menjadi unit analisa penelitian ataupun terhadap individu manusia yang dianggap memiliki data mengenai unit analisa penelitian.

Wawancara dapat digunakan dalam tiga fungsi :

- a. Sebagai alat primer. Wawancara dapat digunakan sebagai alat pengumpul data utama bila data yang akan diungkapkan tidak mungkin diperoleh dengan alat lain yang lebih tepat dan lebih baik.
- b. Sebagai alat pelengkap. Apabila data atau informasi telah diungkapkan namun masih ada beberapa hal yang mesti dijelaskan, maka wawancara dapat digunakan untuk mencari data pelengkap yang tidak bisa diperoleh dengan tekni pengumpulan data yang lain.
- c. Sebagai alat pendukung dan pembanding. Wawancara dapat juga digunakan untuk mengecek kebenaran, ketelitian, dan ketepatan data yang sudah diperoleh dengan menggunakan alat lain.
- d. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan berbagai dokumen atau catatan yang mencatat keadaan konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) di dalam unit analisa yang dijadikan sebagai

objek penelitian. Sumber data, dokumen resmi, arsip, media massa cetak, jurnal, biografi.<sup>18</sup>

## 6. Teknik Analisa Data

Tehnik analisa data adalah suatu tehnik yang mengorganisasikan dan mengurut kedalam pola, kategori, dan satuan uraian besar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti disarankan data. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknis analisis data kualitatif yaitu sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Adapun langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam analisis data adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan berbagai macam kategori fenomena sosial yang disajikan sesuai dengan data yang ada.
- b. Mengabstraksikan tema-tema fenomena sosial yang bersifat induktif
- c. Melakukan interperestasi data
- d. Dialogkan teori lokal dengan teori-teori lain yang ada dalam penelitian.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Diktat Metode Penelitian Sosial, Dian Eka Rahmawati. Hlm 32-35

<sup>19</sup>Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif*, Pustaka Pelajar, 2006, hal 13.